

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

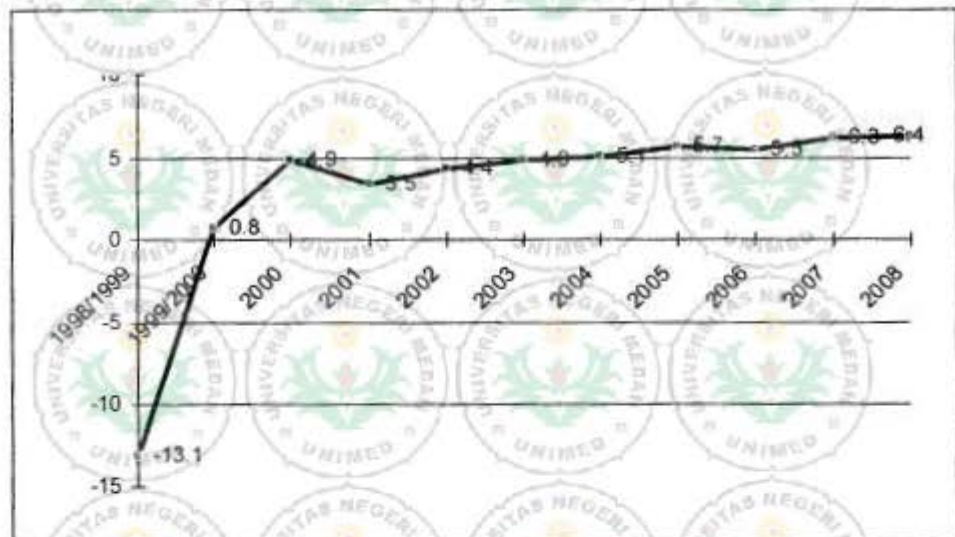
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi di suatu negara. Pembangunan ekonomi itu sendiri adalah proses untuk mengubah suatu keadaan supaya lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan kemakmuran masyarakat.

Kepala Badan Pusat Statistik memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2010 bakal jauh lebih baik dari pada tahun 2009. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi antara 5% - 6% pada tahun 2010, pemerintah memperkirakan membutuhkan investasi kira-kira sebesar Rp 1.700 triliun. Adapun soal sumber dana investasi itu, Menko Ekonomi mengatakan, Pemerintah berharap investor asing dan dalam negeri menanamkan modal sebesar Rp 470 triliun - Rp 490 triliun. Lalu, badan usaha milik negara (BUMN) melakukan investasi senilai Rp. 225 triliun sampai Rp.230 triliun. Selain dari penanaman modal asing, swasta, dan perusahaan pemerintah, investasi Rp 1.700 triliun tersebut juga akan berasal dari belanja infrastruktur Pemerintah yang diperkirakan sebesar Rp.155 triliun hingga Rp.175 triliun. Lalu investasi sekitar Rp.40 triliun sampai Rp.44 triliun diharapkan datang dari keuntungan investor yang diinvestasikan kembali. Selain itu, pemerintah berharap pula ada kontribusi dari investasi di sektor perbankan sebesar Rp 298 triliun sampai Rp 300 triliun, investasi di pasar modal (capital market) sebesar Rp 96 triliun sampai Rp 100 triliun, plus investasi dari sumber lainnya sebesar Rp 340 triliun - Rp 360 triliun (Kompas, 4 Juni 2009).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara peranan investor baik dari modal asing, swasta serta pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) akan mengukur prestasi dari perkembangan sesuatu perekonomian. Dalam analisis makro ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dari perkembangan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara (Sukirno, 1999). Bila produk domestik bruto meningkat maka akan berdampak kepada peningkatan kegiatan ekonomi utamanya sektor riil dan dunia usaha pada umumnya.

**Gambar 1.1**  
**Grafik Pertumbuhan Ekonomi 1998-2008 ( dalam % )**

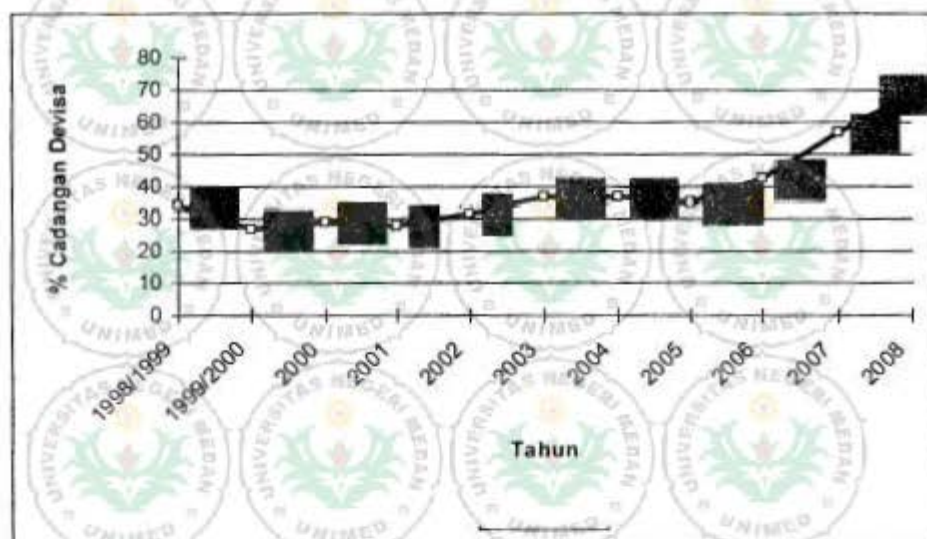


Sumber : BPS

Dalam 10 tahun terakhir (1998-2008), pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, pada tahun 1998 minus 13.1 persen. Namun pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 5.1 persen,

dan tahun 2008 sebesar 6,4 persen. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh semakin mantapnya pertumbuhan baik sektor migas maupun nonmigas masing-masing mengalami pertumbuhan 8,2% dan 4,1% dan -0,6% dalam tahun sebelumnya. Jadi laju pertumbuhan mengalami kenaikan 4,3% dibandingkan 4,7% dalam tahun sebelumnya. Utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dipangkas habis pada tahun 2005. Padahal pada tahun 1998, utang Indonesia kepada IMF sebesar 9.1 miliar dolar AS. Dan pada tahun 2006, seluruh utang berkurang menjadi 7.8 miliar dolar AS.

**Gambar 1.2**  
**Grafik Cadangan Devisa, 1998-2008 (US\$ - Miliar)**



Sumber : BPS

Dari Grafik 1.2 ditunjukkan bahwa cadangan devisa yang semula 33.8 miliar dolar AS di tahun 1998, selanjutnya pada tahun 2008 naik menjadi 69.1 persen. Dilihat dari beberapa indikator makro, perekonomian Indonesia mulai membaik meskipun masih terjadi fluktuasi pada bursa saham maupun pasar uang. Stabilitas



makro ekonomi dapat terjaga dengan baik dengan kurs rupiah yang cenderung menguat, sehingga tingkat inflasi dapat terus ditekan dan suku bunga perbankan terus diturunkan. Selama tahun 2006 kurs rupiah mengalami apresiasi sekitar 8,2 persen, dan selama dua bulan pertama tahun 2007 dapat dikatakan relatif stabil pada kisaran sekitar Rp 9.100 per dollar AS. Angka inflasi yang melonjak tinggi pada tahun 2005 (17,1%) turun menjadi 6,6 persen pada tahun 2006, dan diperkirakan akan terus terkendalikan selama tahun 2007. Selama Januari-Februari 2007 angka inflasi hanya mencapai 1,67% yang lebih rendah dari angka inflasi pada periode yang sama tahun 2006 sebesar 1,95%.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan menjadi suatu fenomena penting yang mempengaruhi perkembangan pembangunan masyarakatnya. Guna mencapai tingkat perekonomian tertentu dalam sistem perekonomian terbuka, peranan pemerintah amat diperlukan. Alokasi dana pemerintah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertindak sebagai alat pengatur urutan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin di capai oleh usaha pembangunan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 tidak lebih baik dari pertumbuhan ekonomi tahun 2005. Meskipun stabilitas ekonomi makro dapat terjaga dengan cukup baik, namun hal tersebut tidak berhasil membangkitkan rasa optimis di kalangan masyarakat. Tingginya tingkat ketidakpastian di kalangan dunia usaha merupakan penyebab utama dari rendahnya tingkat investasi sepanjang tahun 2006 lalu, dan ini tidak lepas dari tidak kunjung kondusifnya iklim usaha di sektor produksi riil. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat dikatakan tidak efektif

untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif karena seringkali dibayangi oleh keragu-raguan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 5,48 persen selama tahun 2006, pertumbuhan investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Bruto) hanya sekitar 2,9 persen yang jauh lebih rendah dari pertumbuhannya pada tahun 2005 yang mencapai 10,8 persen. Rendahnya peningkatan investasi ini telah berlangsung sejak triwulan pertama tahun 2006, terutama investasi dalam bentuk mesin dan perlengkapan luar negeri yang turun sebesar 25,7 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2005 yang mencatatkan kenaikan sebesar 31 persen pada investasi mesin dan perlengkapan luar negeri, maka penurunan investasi yang berkaitan dengan barang modal ini sangatlah signifikan selama tahun 2006.

Dalam teori *economic growth*, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari kemampuan suatu negara dalam mengembangkan potensi sumberdayanya. Faktor yang penting dalam sumber daya pertumbuhan adalah : *human resources*, *capital*, *saving* dan perkembangan teknologi. Human resources sangat membantu pertumbuhan ekonomi melalui *skill* yang dimiliki untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang ada. *Capital* dan *saving* juga merupakan faktor produksi sebagai unsur dominan untuk pertumbuhan ekonomi. Pembentukan kapital bagi negara yang mengalami defisit dalam anggaran pembiayaannya dapat diperoleh melalui dukungan dana dari pinjaman atau utang, sehingga secara eksplisit hutang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Demikian pula, perkembangan teknologi dapat diterima secara luas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, karena teknologi memungkinkan bagi produsen untuk memproduksi lebih banyak dengan tingkat input

yang sama. Perkembangan teknologi bergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan dan kualitas pendidikan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kualitas manusianya.

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrumen fiskal pemerintah senantiasa diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas ekonomi makro serta sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran oleh pemerintah (Suparmoko, 2000). Pembangunan ekonomi di Indonesia ditopang dari sumber-sumber dana dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber pembiayaan dalam negeri berasal dari pajak, retribusi, tabungan pemerintah, tabungan masyarakat serta utang domestik. Sedangkan pembiayaan dari luar negeri berasal dari penanaman modal asing dan utang yang diperoleh dari lembaga-lembaga internasional dan negara-negara sahabat baik dalam rangka bilateral maupun multilateral.

**Gambar 1.3**  
Proporsi Pinjaman Luar Negeri, 1997-2009  
Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor

NEGARA	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 <sup>1)</sup>	
													Nilai	% Total
JEPANG	19.17	22.03	26.00	24.16	21.88	24.57	28.38	28.64	25.58	24.47	24.53	29.61	27.33	43.2%
ADB	5.22	6.13	7.21	7.67	8.04	8.65	8.77	9.04	9.16	9.41	10.18	10.87	10.60	16.8%
WORLD BANK	10.83	11.32	12.09	12.42	12.17	11.53	10.67	9.90	9.11	8.74	8.37	8.96	8.88	14.1%
Lain-Lain <sup>2)</sup>	15.89	16.91	16.42	16.85	16.62	16.58	21.09	21.01	19.25	19.40	19.07	17.24	16.38	25.9%
TOTAL <sup>3)</sup>	51.12	66.39	61.73	61.10	58.90	63.74	68.91	68.69	63.09	62.02	62.26	66.69	63.20	

Sumber : Dirjen Pengelolaan Utang, 2009

Dari Gambar 1.3 terlihat bahwa Jepang merupakan kreditor terbesar, terutama untuk pinjaman proyek pembangunan infrastruktur (Dephub, Dep PU),



Energi (Dep ESDM, PLN), dsb. Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang.

Pada Gambar 4.1 terlihat pula pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukkan dengan *undisbursed loan* (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun. Adanya Perbaikan kinerja karena penerapan kriteria dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek.

**Gambar 1.4**  
**Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1997 – 31 Maret 2009**



Sumber : Dirjen Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan, Edisi 29 Juni 2009.

Pada 16 Agustus 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2008 di hadapan DPR-RI yang merupakan RAPBN ketiga Presiden SBY. Para pengamat ekonomi umumnya kecewa dengan RAPBN 2008 ini. Pertama, karena belum ada perubahan kebijakan APBN, masih seperti yang dulu saja yang sudah berlangsung 40 tahun, yakni anggaran defisit dan utang luar negeri. Dalam RAPBN 2008 pemerintah akan menarik pinjaman baru

Rp134,7 triliun yang terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 91,7 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 43 triliun (4,7 miliar dollar AS dengan kurs Rp 9.100). Pinjaman Rp 134,7 triliun ini terjadi karena total pengeluaran (belanja) negara Rp 896,1 triliun sedangkan total pemasukan (pendapatan) negara dan hibah hanya Rp 761,4 triliun. Besarnya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) diasumsikan Rp 4.306,6 triliun. Dari hitungan ini besarnya defisit anggaran seharusnya Rp 134,7 triliun atau 3,1 persen PDB, bukan Rp 75 triliun atau 1,7 persen PDB.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaporkan rencana total belanja negara hanya Rp 836,4 triliun, karena tidak memasukkan anggaran untuk pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 59,7 triliun. Padahal ini adalah jumlah yang wajib dibayar pemerintah, dan dalam bentuk uang tunai. Pemanfaatan hutang sebagai sumber pembiayaan pertumbuhan ekonomi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan khususnya negara-negara berkembang. Dari perspektif negara donor ada dua hal penting yang dianggap sebagai motivasi dan melandasi mengalirnya bantuan luar negeri ke negara debitor, motivasi politik (*political motivation*) dan motivasi ekonomi (*economic motivation*).

Suksesnya pembangunan kembali perekonomian negara-negara Eropa Barat seperti Jerman dan Italia maupun Jepang pasca perang dunia II pada dekade 1950-an melalui *Marshall Plan* juga merupakan program bantuan luar negeri Amerika (merupakan motivasi politik) dan teori pertumbuhan Harrod-Domar memunculkan konsep pinjaman atau hutang luar negeri (Todaro, 1998). Sedangkan motivasi ekonomi, tercermin dari 4 argumen (Todaro, 1985 dalam Basri, 2005) yaitu : *Pertama*, adalah *foreign exchange constrain* yang didasari atas *two gap*



*model* dimana negara penerima bantuan khususnya negara berkembang mengalami kekurangan dalam mengakumulasi tabungan domestik sehingga tingkat tabungan yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan akan tingkat investasi yang dibutuhkan dalam proses memicu pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain adalah kekurangan yang dialami oleh negara yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan nilai tukar asing (*foreign exchange*) untuk membiayai kebutuhan impor barang modal (*capital goods*) dan impor barang-barang intermediate (*intermediate goods*). Dengan demikian untuk menutupi kedua kekurangan tersebut maka andalannya adalah bantuan luar negeri.

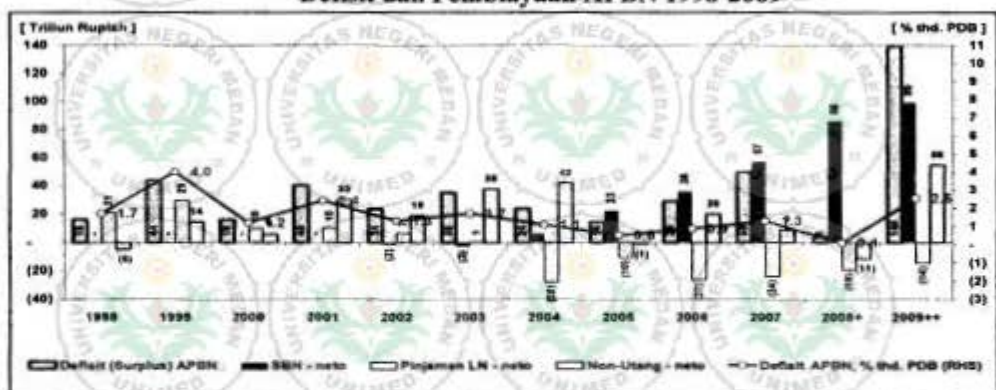
*Kedua* : adalah *growth and saving*, yakni untuk memfasilitasi dan mempercepat proses pembangunan dengan cara meningkatkan pertambahan tabungan domestik sebagai akibat dari tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.

*Ketiga* : *Technical assistance*, yang merupakan pendamping dari bantuan keuangan yang bentuknya transfer sumber daya manusia tingkat tinggi kepada negara-negara penerima bantuan, untuk menjamin aliran dana yang masuk dapat digunakan dengan sangat efisien dalam proses memicu kenaikan pertumbuhan ekonomi. Dan yang *keempat* : adalah *absorptive capacity* yakni dalam bentuk apa dana tersebut akan digunakan, dan faktor ini tentu saja merupakan perpaduan antara motif ekonomi dan politik yang menjadi pertimbangan utama bagi seorang investor yang rasional.

Indonesia selama ini menempatkan utang sebagai salah satu tiang penyangga pembangunan. Sejak Pelita I, hutang luar negeri telah dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan guna menutupi kelangkaan modal. Tabungan pemerintah ataupun tabungan domestik tidak dapat menutupi kebutuhan dana

pembangunan dan investasi (*saving-investment gap*). Selain itu juga permintaan hutang luar negeri digunakan untuk menutupi *export-import gap* dan *fiscal gap*. Kebijakan anggaran belanja berimbang pemerintah Indonesia menempatkan utang luar negeri sebagai komponen penutup kekurangan. Saat Indonesia mendapat rejeki berlimpah dari *oil boom*, utang luar negeri tetap saja menjadi komponen utama pemasukan di dalam anggaran belanja pemerintah. Bahkan saat Indonesia telah mulai menganut sistem anggaran defisit/surplus sejak tahun 2005, komponen pembiayaan utang luar negeri cukup besar. Padahal di dalam kebijakan ekonominya pemerintah selalu mengatakan bahwa utang luar negeri hanya menjadi pelengkap belaka (Makmun, 2005). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.06/2005 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2005-2009 menyebutkan sampai saat ini, utang masih merupakan sumber utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit maupun untuk pembayaran kembali pokok utang yang telah jatuh tempo atau yang disebut *refinancing*.

Grafik 1.5  
Defisit dan Pembiayaan APBN 1998-2009



Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang – Departemen Keuangan RI

Penerbitan SBN/Surat Berharga Negara pada tahun 2008, terutama di pasar domestik diharapkan antara lain untuk Refinancing utang lama, mengurangi pinjaman luar negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik sehingga untuk menutupi pembiayaan APBN. Dan pada tahun 2009 diharapkan perekonomian diharapkan berkembang ke arah surplus. Dibawah ini menunjukkan outstanding utang pemerintah dalam kurun 1997-2009:

**Gambar 1.6**  
**Outstanding Utang Pemerintah, 1997 – 2009**



Sumber : Dirjen Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan, 29 Juni 2009

Makmun (2005) berpendapat adanya utang luar negeri juga membuat pemerintah tidak serius mengumpulkan pendapatan dari dalam negeri. Beberapa kekurangan yang terjadi di dalam penyusunan RAPBN dianggap oleh pemerintah dapat ditutup dari perolehan pinjaman luar negeri. Dampak utang luar negeri (LN) pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi banyak dipertanyakan orang. Hutang pemerintah secara statistik meningkat dalam 3 tahun terakhir setelah beberapa tahun berhasil ditahan pada tingkat yang kurang lebih sama. Berdasarkan data Departemen



Kuangan, posisi utang pemerintah dari tahun 2000 hingga 2004 berada di bawah Rp1.300 triliun. Selama tiga tahun kemudian, secara berturut-turut, utang pemerintah berada di bawah Rp1.400 triliun. Baru pada tahun berikutnya, yakni akhir 2008, utang itu melonjak menjadi Rp1.636 triliun. Dibandingkan 2007, utang luar negeri Indonesia bertambah dari USD62,25 miliar menjadi USD66,69 miliar.

Peningkatan ini terjadi karena sebagian besar utang pemerintah menggunakan mata uang yen yang pada akhir 2008 nilai tukarnya terhadap dolar Amerika Serikat (AS) meningkat tajam. Ini terjadi karena proses *deleveraging*, perubahan peran mata uang yen. Mata uang yen semula banyak dipinjam karena bunganya sangat rendah untuk ditanamkan dalam mata uang lain, terutama dolar Australia yang bunganya jauh lebih tinggi. Fenomena yang sering dikenal sebagai yen carry trade tersebut tiba-tiba berbalik sehingga yen, tanpa sebab yang jelas, menjadi sangat menguat terhadap dolar. Faktor kedua adalah menguatnya mata uang dolar AS terhadap rupiah. Jika pada akhir 2007 nilai tukar dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp9.419, pada akhir 2008 nilai tukar dolar AS meningkat tajam menjadi Rp10.950. Peningkatan nilai tukar mata uang dolar AS ini mengakibatkan kenaikan jumlah utang luar negeri dalam rupiah. Jika nilai tukar dolar AS terhadap rupiah stabil pada 2008, kenaikan utang luar negeri yang akan terjadi (dalam rupiah) adalah sebesar Rp 41,8 triliun. Inilah yang disebut dengan nilai yang disebabkan adanya penguatan mata uang Yen terhadap dolar AS. Sementara itu, peningkatan utang luar negeri yang disebabkan penguatan mata uang dolar terhadap rupiah adalah sebesar Rp102 triliun. Apabila dijumlahkan, kedua faktor tersebut mengakibatkan kenaikan utang sebesar Rp. 143,8 triliun.

Gambar 1.7



Sumber : BPS

Menteri Keuangan (1999) mengemukakan mengenai dilema kehadiran dan fungsi Hutang Luar Negeri ditengah perekonomian Indonesia yang telah dua tahun terlanda krisis. Krisis ekonomi sendiri memberikan bobot yang sangat berbeda terhadap kehadiran hutang luar ini karena selama dua tahun terakhir terjadi penambahan hutang luar negeri oleh pemerintah yang sangat signifikan akibat diterimanya paket pinjaman IMF sebesar US \$ 43 milyar. Posisi hutang luar negeri sebelum krisis sekitar US \$ 110 miliar melonjak menjadi US \$ 152 miliar pada Maret 1999. Krisis ekonomi juga menyebabkan terjadinya pengalihan hutang privat ke publik akibat program restrukturisasi perbankan yang rumit dan dengan biaya yang makin membengkak hingga diperkirakan mencapai sekitar Rp. 550 triliun. Bahkan prediksi dampak krisis terhadap hutang luar negeri kita dan implikasinya terhadap perekonomian menampakkan gambaran yang suram. Krisis ekonomi yang ditandai oleh perubahan yang sangat drastis dari nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing



memberikan dampak yang sangat dahsyat bagi hutang luar negeri Indonesia baik hutang swasta maupun pemerintah. Hal ini merupakan manifestasi dari *Mundel-Flemming Model* (Chowdhury & Saleh, 2007) yang menyatakan bahwa penambahan dalam defisit anggaran akan mendorong tingkat suku bunga melalui arus modal masuk dan apresiasi nilai tukar, sehingga terjadi penurunan terhadap neraca berjalan.

Utang pemerintah dan swasta di Indonesia selama 15 tahun terakhir ini semakin mengalami perkembangan yang pesat. Selain itu, juga terlihat bahwa jika pada tahun 1990 keseluruhan utang hanya sekitar 46 milyar USD, maka pada tahun 2004 telah mencapai 137 milyar USD. Atau meningkat sekitar 3 kalinya. Apabila dilihat dari pertumbuhannya terlihat bahwa pada tahun 1991 terjadi pertumbuhan utang luar negeri yang paling besar baik utang pemerintah maupun utang swasta. Di satu sisi ini merupakan wujud kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia, namun di sisi lain ini akan semakin menambah beban ekonomi domestik.

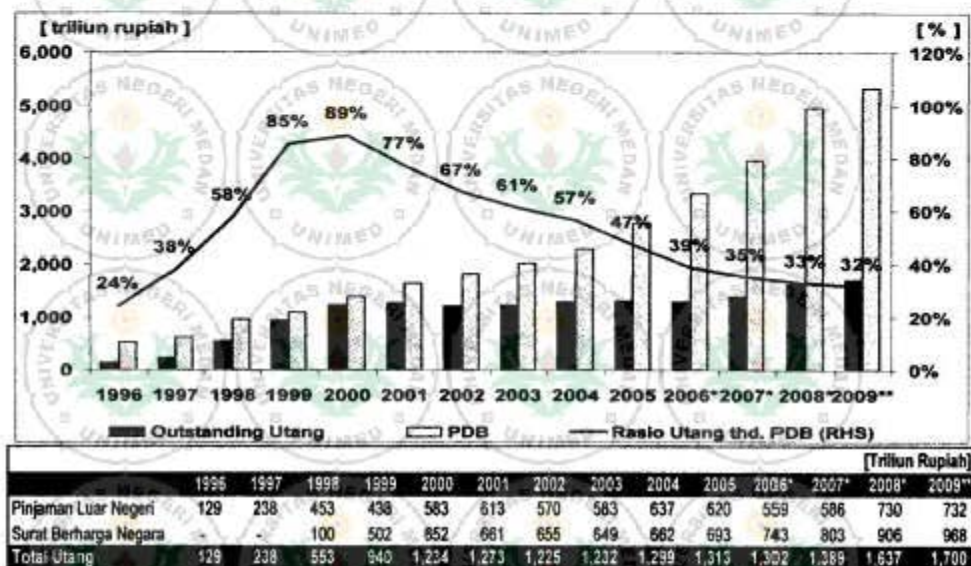
Namun demikian, pengamat ekonomi Chatib Basri (2009) mengatakan bahwa kondisi utang luar negeri Indonesia masih sangat baik dilihat dari rasionya terhadap PDB secara nasional. Hal ini dilihat dari Rasio utang pemerintah terhadap PDB itu turun dari 50% pada tahun 2004 menjadi 32% tahun ini. Menurutnya, penilaian terhadap kondisi utang luar negeri suatu negara tidak bisa dilihat dari jumlah utangnya, tetapi dari rasio utang itu terhadap produk domestik bruto (PDB) negara itu. Lebih lanjut dikatakannya, meski jumlah utang luar negeri Indonesia meningkat tetapi secara rasio terhadap PDB terus turun yang menunjukkan manajemen utang pemerintah semakin baik. Tujuan utama pembangunan ekonomi



dengan berutang adalah supaya PDB negara itu naik sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan dan kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan

Gambar 1.8

Grafik Perkembangan Ratio Utang Pemerintah terhadap PDB 1996-2009



Sumber : Dirjen Pengelolaan Utang, Dep. Keuangan, Edisi 29 Juni 2009

Tambahan utang 2004 – 2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar, sehingga rasio utang menurun tajam dari 57 % pada akhir tahun 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32 % pada akhir tahun 2009 atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38 %.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud menganalisa pengaruh hutang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengakomodasikan berbagai variabel yang berkaitan dengan permintaan hutang pemerintah, dengan judul “ Analisis Pengaruh Hutang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana mekanisme dan besarnya pengaruh tingkat pembentukan stok kapital, tingkat tabungan dan hutang, tingkat pertumbuhan tenaga kerja, tingkat kemajuan teknologi dan tingkat depresiasi stok kapital terhadap pertumbuhan ekonomi ?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pembentukan stok kapital, tingkat tabungan dan hutang, tingkat pertumbuhan tenaga kerja, tingkat kemajuan teknologi dan tingkat depresiasi stok kapital terhadap pertumbuhan ekonomi melalui studi empiris.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil dari studi empiris yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Menjadi masukan bagi investor, praktisi perbankan dan pengambil kebijakan publik dalam memformulasikan kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia
2. Memberikan umpan balik kepada pemerintah tentang pengaruh hutang Nasional, tabungan, stok kapital, tenaga kerja, kemajuan teknologi dan depresiasi stok kapital terhadap pertumbuhan ekonomi .